



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 22 Januari 2021

Halaman: 1

PHRI Tolak Rencana Perpanjangan

BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ menolak rencana Pemprov DIJ memperpanjang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) yang akan selesai 25 Januari. Dampak kebijakan ini, puluhan hotel sudah tidak beroperasi

Baca PHRI... Hal 3

Sambungan dari hal 1

Ketua BPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono mengatakan, dampak PTKM pertama sejak bergulir 11 Januari menyebabkan tingkat hunian merosot tajam dan reservasi hotel drop. Tingkat hunian sampai saat ini hanya 13,5 persen, jauh dari harapan.

"Kami, BPD PHRI menolak perpanjangan PTKM. Sikap kami sudah jelas dan tegas," kata Deddy kemarin (21/1). Ia menjelaskan, industri perhotelan dan restoran sudah terpukul dengan paguebluk corona. Pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu ditargetkan menjadi peluang meningkatkan hunian hotel sebesar 70 persen dengan kapasitas kamar yang dioperasikan sesuai proses. Namun, okupansi hotel hanya diperoleh 18,5 persen.

Ditambah adanya kebijakan PTKM, makin menambah kemerosotan reservasi hotel. Bahkan saat ini belum ada satu atau dua reservasi yang masuk, baik melalui *online* maupun via telepon. "Ini kan menyedihkan. Jadi sekarang kami di ambang kekhawatiran dan titik nadir," ungkapnya.

Akibat kebijakan PTKM ini, potensi karyawan dirumahnya semakin bertambah. Sebelumnya karena pandemi sudah sekitar seribu karyawan hotel dan restoran dirumahkan. Sebab, hotel dan restoran yang mengalami penurunan pengunjung cukup dalam berdampak pada pendapatan usaha.

Bisnis hotel telah mengalami tekanan jumlah pengunjung atau okupansi yang anjlok. Ini dilakukan sebagai langkah efisiensi karena penyumbang terbesar biaya operasional hotel dan restoran adalah biaya tenaga dan listrik. "Sebetulnya dirumahkan itu kan bukan kehendak kita, itu keputusan yang sangat berat. Tapi untuk bertahan, ini yang harus kami lakukan," tandasnya.

Dari 400 anggota PHRI DIJ, di antara 200 hotel dan restoran hampir mati, 30 sudah mati atau tidak beroperasi, dan 170 lainnya terengah-engah. Hotel yang sudah tidak beroperasi ini karena sudah tergerus beban yang cukup berat untuk biaya operasional hotel. "Karena oksigennya sudah habis. Mati ya sudah tidak beroperasi lagi dan memberhentikan karyawannya," jelasnya.

BPD PHRI DIJ masih berharap komitmen pemerintah bahwa antara kesehatan dan ekonomi harus selaras berjalan beriringan. Yakni dengan proses ketat melalui verifikasi proses dari

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 19 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005